



STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

¹ Rifqi Maulana, ²Dera Izar Hasanah

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
robertsergio709@gmail.com

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
ziefanigabriela@yahoo.com

Received 1 Januari 2024; Revised: 1 Januari 2024; Accepted: 2 Januari 2024; Published: Januari 2024; Available online: Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa banjarsari dalam mengembangkan desa wisata dikecamatan pangalengan kabupaten bandung, Melibatkan peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi lokal melalui media digital, partisipasi aktif Masyarakat, dan kemitraan dengan pihak terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami Langkah-Langkah konkret yang ditempuh dalam menggalakkan sektor pariwisata, hasil penelitian menyoroti keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut. Metode yang efektif melibatkan kombinasi dari aspek-aspek di atas, dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat setempat. diharapkan strategi ini dapat mengoptimalkan potensi wisata, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan di Desa Banjarsari. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah bahwa Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil merancang dan menerapkan strategi yang holistik dan berdaya guna untuk mengembangkan desa wisata di wilayah mereka. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek kultural, alam, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mereka telah menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Desa, Desa Wisata .

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi menghadapi tantangan masa depan dibutuhkan strategi untuk pengembangan masyarakat dengan mengembangkan potensi - potensi yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Tiap pemerintah daerah

memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam mengembangkan desanya dari segala aspek bidang kehidupan. Masing - Masing desa pastinya memiliki keunggulan untuk bisa dikembangkan menjadi lebih maju dan berkembang. Strategi disini berkaitan dengan sebuah langkah - langkah atau cara yang di susun

untuk mencapai tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan prioritas sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah, paradigma lama [pembangunan] yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru [pemberdayaan] lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif.

Salah satu kunci pembangunan di Indonesia yaitu pembangunan dalam sektor pariwisata. Pariwisata sebagai sector yang strategis dipastikan dapat menggerakkan perekonomian bangsa sehingga pariwisata termasuk kedalam lima sector prioritas pembangunan pada tahun 2023 ini. Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024, secara bertahap dari tahun ketahun dalam periode 5 tahun. Di tahun 2023 yang baru kita masuki ini sector pariwisata secara konsisten menjadi program prioritas, yaitu pembangunan pariwisata Indonesia "Wonderfull Indonesia" Pariwisata sebagai sector yang strategis dan menjadi media intregasi program dan kegiatan antar sector pembangunan, sehingga pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi leading pembangunan. Maksud menjadi leading pembangunan adalah dapat menggerakkan perekonomian bangsa, pariwisata menjadi kunci pembangunan, kesejahteraan dan

kebahagiaan. Dengan meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata di Indonesia. Menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.

Menurut (Spillane, 1994) Pembangunan sector kepariwisataan akan terkait dengan aspek social budaya, politik dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. potensi pariwisata merupakan sector andalan dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata ini mempunyai arti penting dalam hal peningkatan devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi social dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi, baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan, maupun kebudayaan mereka.

Pengembangan Pariwisata merupakan kajian dari pembangunan yang konsepnya sudah ada dengan meningkatkan setiap strukturnya dan fungsinya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan

sarana dan prasarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan [munasef, 1995:1] alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah.

Desa Banjarsari merupakan sebuah desa yang terletak di daerah pedesaan dengan potensi alam dan budaya yang melimpah. Desa ini memiliki keindahan alam yang memikat, seperti perbukitan yang hijau, pemandangan alam yang memanjakan mata, dan tempat wisatawan untuk berlibur bareng keluarga yaitu diantaranya : 1. Teh jangkung Malabar, 2. Makam K.A.R Bosscha, 3. NIMO Highland dan 4. Kolam Renang Tirta Camelia

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata telah menjadi fokus perhatian bagi pemerintah desa Banjarsari. Pemerintah desa menyadari potensi besar yang dimiliki desa ini sebagai daerah wisata yang menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Namun, pengembangan desa wisata tidaklah semudah yang diharapkan. Masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata Banjarsari.

Pertama, Sebagian besar masyarakat desa masih memandang potensi wisata hanya sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak menguntungkan secara ekonomi. Hal ini menghambat upaya

pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan strategi pengembangan desa wisata yang efektif.

Kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah desa dan masyarakat setempat mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengembangan, pemasaran, dan pengelolaan desa wisata. Ini termasuk pengetahuan tentang perencanaan infrastruktur yang tepat, pengembangan produk wisata yang unik, pelatihan bagi pelaku usaha lokal, dan promosi yang efektif.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dan pendanaan. Pengembangan desa wisata memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, pelatihan, promosi, dan pemeliharaan. Pemerintah desa mungkin menghadapi kendala dalam mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan desa wisata secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan pendanaan juga dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan strategi pengembangan desa wisata yang optimal.

Mengingat tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah desa Banjarsari untuk mengidentifikasi dan merancang strategi yang efektif dalam mengembangkan desa wisata. Dengan begitu, desa Banjarsari dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintahan desa dalam

TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi

Strategi publik menurut Mulgan dalam (Suwarsono, 2012) menyatakan bahwa "*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies to achieve public goods*" atau dalam pengertian bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya publik dan kekuatan oleh lembaga lembaga publik untuk mencapai tujuan dari penggunaan barang publik.

Sedangkan dalam pengertian lain, menurut (Andrews, 2005) , strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi). Maka dari itu, peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2008) ,

mengembangkan desa wisata di Desa Banjarsari.

sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:

1. Berdasarkan Pengertian di atas, Geoff Mulgan, menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, *Purposes* (Tujuan), peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh konsep masyarakat Jepang tentang tujuan (*purposes*) itu sendiri, yang dinamakan *Ikigai*, yang merupakan konsep masyarakat Jepang yang berarti sebuah alasan untuk tujuan. Di mana indikator dari *Ikigai* adalah, *mission* (misi) dan *passion/vocation* (bakat/kemampuan). Dari indikator konsep masyarakat Jepang tentang tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki sebuah tujuan dibutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasi misi tersebut.
2. *Environtment* (Lingkungan), peneliti mengambil teori yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency*, 2011. Yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari *changes in ambitient conditions* (perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar), dan *change of human health* (perubahan pada kesehatan manusia).
3. *Direction* (Pengarahan), peneliti mengambil teori yang

dikemukakan oleh George R. Terry (1986), yang merupakan "usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota - anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut." Pada bagian ini terdapat empat indikator pengarah atau *directions*, di antaranya adalah, koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Pada *directions* atau pengarah dapat kita ketahui ada empat indikator yang dapat menjadi acuan dari sebuah pengarah.

4. *Action* (Tindakan), pada bagian ini terdapat tiga indikator, di antaranya adalah: *external situation* (situasi eksternal), *device* (perangkat yang digunakan), dan *decission making* (pengambilan keputusan). Ketiga hal ini sangat berkaitan erat saat akan melakukan sebuah tindakan.
5. *Learning* (Pembelajaran), pada bagian ini terdapat dua indikator penting, di antaranya adalah: *comparation method* (metode perbandingan), dan *identification* (identifikasi).

2. Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal,

atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "a group of houses or shops in a country area, smaller than and town" Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal - usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan dalam pengertian lain dikutip dari (Widdy Yuspita Widyaningrum, 2023) memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan pada akhirnya berdasarkan pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa merujuk pada sistem pemerintahan yang berlaku di tingkat paling dasar dari struktur pemerintahan di suatu negara. Desa adalah unit administratif terkecil di dalam suatu negara, terutama dalam konteks negara-negara yang menerapkan sistem desentralisasi.

3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

Desa wisata Menurut (Dino Gustav Leonandry, 2018) Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan social ekonomi, social budaya, adat istiadat, keseharian memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik

dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Kemudian dalam pengembangan desa tersebut hakikatnya berpariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Pembangunan pariwisata harus melibatkan pemerintah, semua lapisan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan atas serta swasta. Semuanya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata untuk menunjang pembangunan pariwisata. Masyarakat mempunyai dorongan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa harus ikut membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut serta menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah paham akan mendapat manfaat yang positif. Suwanto dalam (Nawawi, 2013) menyebutkan Tata kelola pariwisata yang baik

merupakan tujuan serta cita-cita dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta agar sektor pariwisata dapat semakin maju berkembang pesat. Pengelolaan suatu objek dan daya tarik wisata, memang tak lepas dari semua kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya keparawisataan.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan tipe penelitian deskriptif dengan pengertian sebagai mana dikutip dari (Hatmawan, 2020) yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, Faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang penelitian terhadap strategi Desa Banjarsari. Data penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang didapat melalui wawancara mendalam, untuk memudahkan dalam membuat deskripsi, peneliti bisa menggunakan analisis berdasarkan kalimat seperti subjek, objek, predikat atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang

penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Sedangkan untuk Teknik pengumpulan data digunakan 3 tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yaitu, Kepala Desa Banjarsari, Sekretaris Desa Banjarsari dan Masyarakat Desa Banjarsari.

PEMBAHASAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan landasan atau konsep dasar yang mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks "Pemerintah Desa Banjarsari Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Desa Wisata," terdapat beberapa teori tujuan yang mungkin menjadi dasar pemikiran dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Tujuan dalam pengembangan pariwisata Desa Banjarsari merupakan gambaran hasil dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini dapat memberikan panduan untuk evaluasi, penyesuaian, dan perencanaan lebih lanjut guna menjaga kelancaran dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di masa mendatang.

Untuk tujuan terkait peningkatan ekonomi di Desa Banjarsari dapat mencakup data-data yang menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, kontribusi sektor

pariwisata terhadap PDB desa, peningkatan jumlah lapangan kerja, dan perkembangan usaha lokal terkait pariwisata. Jika tercapai, tujuan ini akan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi desa

2. Kondisi Lingkungan

Pengertian kondisi lingkungan dalam konteks pengembangan pariwisata Desa Banjarsari sebagai Desa Wisata merujuk pada pemahaman mendalam tentang faktor-faktor lingkungan alam, budaya, dan sosial yang ada di sekitar desa dan dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata. kondisi lingkungan dalam pengembangan pariwisata Desa Banjarsari sebagai Desa Wisata merupakan ringkasan dari hasil analisis dan pemahaman tentang faktor-faktor lingkungan alam, budaya, dan sosial yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata. mencerminkan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar desa dan bagaimana faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata dan penilaian terhadap potensi daya tarik alam di Desa Banjarsari, seperti pemandangan alam, keindahan alam, dan jenis-jenis ekosistem yang ada. Potensi ini akan membantu pemerintah desa mengembangkan strategi pariwisata yang berfokus pada ekowisata, petualangan alam, atau aktivitas luar ruangan.

3. Pengarahan

Pengarahan dalam pengembangan pariwisata Desa Banjarsari sebagai Desa Wisata merujuk pada proses pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan dan memastikan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program pengembangan pariwisata. Pengarahan melibatkan pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, dan pengaturan berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian pengarahan dalam konteks ini:

"Teori pengarahan" dalam konteks pengembangan pariwisata Desa Banjarsari sebagai Desa Wisata mungkin mengacu pada pendekatan atau panduan yang mengarahkan langkah-langkah pengembangan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara lebih efektif. Dalam hal ini, teori pengarahan dapat merujuk pada strategi dan taktik yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Berikut adalah penjabaran mengenai konsep ini:

Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas: Teori pengarahan mengarahkan pemerintah desa untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pariwisata. Ini termasuk

pembangunan akomodasi, sarana transportasi, restoran, dan fasilitas umum lainnya. **Promosi dan Pemasaran:** Pemerintah desa perlu mengarahkan upaya promosi dan pemasaran yang tepat untuk menarik wisatawan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai saluran komunikasi dan platform untuk memperkenalkan potensi dan daya tarik Desa Banjarsari kepada khalayak luas. Kesimpulan pengarahan ini memberikan panduan dan arah yang jelas bagi Pemerintah Desa Banjarsari dan masyarakat dalam mengembangkan desa wisata. Dengan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam, dan keterlibatan aktif dari semua pihak, pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan berhasil, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang positif bagi desa dan komunitasnya. Pengarahan yang efektif memastikan bahwa program-program pengembangan pariwisata di Desa Banjarsari dirancang dan diatur dengan jelas. Ini membantu dalam menghindari kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan dan memastikan bahwa semua kegiatan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik

4. Tindakan

Pengertian tindakan dalam pengembangan pariwisata Desa Banjarsari sebagai Desa Wisata merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan rencana pengembangan pariwisata. Tindakan mencakup serangkaian

aktivitas dan upaya yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan. Tindakan pemerintah Desa Banjarsari dalam Pengembangan Desa Wisata yaitu, memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata

Melalui tindakan yang memfasilitasi interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, Pemerintah Desa Banjarsari menciptakan pengalaman wisata yang lebih mendalam dan bermakna. Wisatawan memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengenal budaya, dan berbagi cerita, yang meningkatkan apresiasi mereka terhadap destinasi dan telah menyelenggarakan kegiatan edukatif dan pelatihan bagi wisatawan untuk memahami lebih baik budaya dan keterampilan lokal. Tindakan ini membantu dalam menyediakan pengalaman belajar yang positif bagi wisatawan sambil mendukung keterampilan dan pendapatan masyarakat desa

5. Pembelajaran

Pembelajaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarsari dalam pengembangan desa wisata mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat desa tentang aspek-aspek terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata di daerah mereka.

Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan desa menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam pembelajaran pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarsari.

Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan Teori pembelajaran mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara Desa Banjarsari dengan komunitas pariwisata lainnya. Berbagi pengalaman, pelajaran, dan praktik terbaik dapat memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan pengembangan pariwisata.

Kerjasama dan Kolaborasi Penerapan pembelajaran kolaboratif telah menghasilkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk warga desa, pelaku usaha lokal, dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan yang lebih baik dalam desa wisata.

Mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Banjarsari untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pengembangan desa wisata. Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman, pemerintah desa dapat merancang strategi yang lebih baik, meningkatkan dampak positif, dan menjaga keseimbangan yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemahaman ini, pemerintah desa dapat merumuskan strategi pariwisata yang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa. Pengembangan ekowisata, petualangan alam, atau aktivitas luar ruangan dapat menjadi fokus utama berdasarkan potensi daya tarik alam yang ada. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata, Desa Banjarsari dapat merancang pengalaman wisata yang berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan menarik bagi wisatawan.

Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil merancang dan menerapkan strategi yang holistik dan berdaya guna untuk mengembangkan desa wisata di wilayah mereka. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek kultural, alam, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mereka telah menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan mengadopsi strategi ini, Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil menciptakan pengalaman wisata yang autentik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pariwisata lokal. Keseluruhan, strategi ini mewakili upaya yang holistik dan berdaya guna dalam mengembangkan Desa Banjarsari menjadi destinasi wisata yang menarik dan berdampak positif.

2. Saran

1. Penyempurnaan Perencanaan dan Pengembangan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai potensi wisata desa, termasuk analisis pasar dan tren wisata terkini, untuk merancang program yang lebih sesuai dengan permintaan wisatawan.
2. Ajak ahli pariwisata atau konsultan untuk memberikan pandangan dan saran mengenai strategi pengembangan yang lebih berfokus.
3. Tetapkan pedoman pengelolaan dan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan akibat kunjungan wisatawan, dan libatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan mereka dalam program-program pembersihan atau tanam pohon.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, K. (2005). *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Dino Gustav Leonandry, M. L. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Bandung. *Ji@P*, 70-74.
- Hatmawan, R. S. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian*

- Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen.*
Yogyakarta: Deepublish.
- Mulgan, G. (2008). *The Art of Public Strategy-Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good.* New York: Oxford University Inc.
- Nawawi, I. (2013). *Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja.* . Jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri.
- Spillane, J. (1994). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan.* Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarsono, M. (2012). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik.* Jakarta: Erlangga.
- Widdy Yuspita Widyaningrum, I. A. (2023). Collaborative Governance on Mangrove Rehabilitaion by Indralayang Village and PT. PLN West Java at Karang Modang. *Proceedigs of the 3rd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (pp. 1149-1160). Yogyakarta: Atlantis Press.